

Pengaruh transparansi akuntabilitas
dan partisipasi masyarakat terhadap
pengelolaan alokasi dana desa didesa
Jetis kecamatan pace kabupaten
Nganjuk

By AKUNTANSI PPI UNP KEDIRI

BAB I PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan tingkat pemerintahan terendah di Indonesia, namun memiliki peranan yang sangat vital dalam penyediaan layanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat yang langsung berhubungan dengan warganya. Selain itu, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru mengenai pembangunan dari tingkat bawah, termasuk daerah pinggiran. Oleh karena itu, disahkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa. Dengan adanya UU Desa ini, diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah desa untuk memajukan desanya, serta berperan dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Dalam rangka menjalankan tugasnya dan mewujudkan pengelolaan pembangunan desa yang efektif, sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, desa memiliki hak untuk mengelola sumber pendapatannya sendiri, salah satunya melalui dana desa. Dana desa (DD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditransfer ke tiap kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan warga (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Pembangunan desa adalah program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 menjelaskan dengan jelas bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa melibatkan pemerintah desa serta seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan desanya sendiri melalui pemberian alokasi dana desa (ADD), yang dilakukan oleh pemerintah daerah. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, yang minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 4). Tujuan dari pemberian ADD ini adalah untuk mendanai kegiatan operasional dan program pembangunan di desa.

Adanya banyak kasus penyalahgunaan dana desa mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas aparat desa melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 (2014) tentang pengelolaan keuangan desa, yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa harus berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, dibutuhkan aparat desa yang kompeten baik dalam hal teknis maupun administratif dalam mengelola dana desa.

Transparansi adalah prinsip dasar dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka, serta memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan, di mana aparat desa memberikan akses luas bagi warga untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpercayaan terhadap aparat desa dan menjalin hubungan yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga, transparansi memengaruhi pengelolaan dana desa secara positif, yang didukung oleh penelitian yang menunjukkan pengaruh positif antara transparansi dan pengelolaan dana desa. Namun, ada juga penelitian yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting. Pengelolaan yang baik adalah yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Teori keagenan terkait dengan akuntabilitas karena perangkat desa bertanggung jawab atas kinerja pengelolaan dana desa kepada masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun, ada pula penelitian yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Yanto & Aqfir, 2021).

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam kesuksesan pemerintah dalam mengelola dana desa, karena masyarakat berperan sebagai pengawas dan memberikan aspirasi. Partisipasi masyarakat juga membantu dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Masyarakat berhak untuk mengevaluasi, menilai, dan mengawasi pengelolaan dana desa agar pengelolaannya dapat berjalan tertib. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang baik, pengelolaan dana desa dapat dikatakan optimal. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020), namun ada pula penelitian yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Yanto & Aqfir, 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk membahasnya dalam judul **"Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap alokasi dana desa" studi kasus pada Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam hal ini yaitu :

- a) Apakah tingkat transparansi pemerintah desa berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ?
- b) Apakah akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ?
- c) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ?
- d) Apakah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu langkah untuk menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan melalui penelusuran ilmiah terhadap prosedur. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- a) Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
- b) Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
- c) Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
- d) Untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka dari itu penulis berharap penelitian dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tentang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi ataupun saran bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah desa tentang pentingnya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Dana Desa

1. Definisi Dana Desa

Dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11). Dana ini, yang berasal dari APBN, merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kepala desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa ini minimal sebesar 10% dari distribusi proporsional yang diberikan kepada setiap desa.

Tujuan utama dari ²³ dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, melalui peningkatan pelayanan publik, kemajuan ekonomi desa, pengurangan kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat posisi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Dalam pengelolaan keuangan desa dan dalam hal kepemilikan kekayaan desa yang terpisah, kepala desa memegang peranan penting. Kepala desa bertanggung jawab untuk menetapkan PTKPD (Pelaksanaan Teknik Pengelolaan Keuangan Desa), menentukan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang sudah ditetapkan dalam APBDesa, serta melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran yang menjadi beban anggaran APBDesa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pelaksana Teknik Pengelolaan Dana Desa (PTKPD) terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi (kasi), dan bendahara desa. Tugas sekretaris desa adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun reperdes (Rencana Peraturan Desa) tentang APBDesa, perubahan APBDesa, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang ada dalam APBD, dan memverifikasi rencana belanja serta bukti-bukti pengeluaran.

Kepala seksi memiliki tugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang telah ditetapkan dalam APBD, mengambil tindakan pengeluaran yang berdampak pada beban anggaran kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, serta menyiapkan dokumen anggaran yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan bendahara desa bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, mengatur, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD.

2. ⁹Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa pada tahun 2016, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran dana desa dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Maret yang mencakup 60% dari total dana, dan tahap kedua pada bulan Agustus yang mencakup 40%. Penyaluran pada tahap pertama baru

dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan dana desa untuk tahun anggaran sebelumnya (2015).

Pemerintah menargetkan agar anggaran dalam APBN 2016 tersebut dapat segera tersalurkan keseluruh desa. Dalam pelaksanaan penyaluran dana desa tahun 2015 menemui beberapa kendala diantaranya pemerintah desa belum memiliki rekening kas desa, tidak adanya perbankan yang menjangkau hingga ke pelosok dan pemerintah daerah belum/lambat dalam menyampaikan laporan penggunaan dana desa yang sudah diterima sebelumnya sehingga mengakibatkan proses penyaluran ke seluruh desa pada tahap selanjutnya tidak berjalan dengan baik. Pada penyaluran dana desa tahap ketiga, ditemui juga kendala sebagaimana disampaikan oleh kementerian keuangan (Kemenkeu) yang menyebutkan, penyaluran dana desa tahap ketiga terancam batal direalisasikan. Penyebabnya banyak daerah yang belum melaporkan 100 persen penyerapan dana desa untuk tahap satu dan tahap dua yang sudah dikirimkan pemerintah pusat. (R Rudy Karyanto, 2016).

3. Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan kemasyarakatan. Namun, dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 06 Tahun 2014 Pasal 19). Dalam hal pemberdayaan masyarakat, dana desa digunakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga desa dalam mengembangkan wirausaha, meningkatkan pendapatan, dan memperluas skala ekonomi, baik untuk individu maupun kelompok masyarakat dan desa secara keseluruhan. Kegiatan pemberdayaan ini diprioritaskan berdasarkan tipologi desa, yang meliputi desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang,

dan desa maju atau mandiri.

4. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta melaksanakan kegiatan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Pengelolaan alokasi dana desa mencakup tiga aspek penting: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah tahap pertama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pada tahap ini, kegiatan perencanaan dilakukan untuk menyusun rencana pelaksanaan ADD. Setiap dusun akan mengadakan musyawarah dusun untuk menampung berbagai usulan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan (Permendagri 2014).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya berasal dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa (pemerintah desa). Untuk memastikan keterbukaan dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD harus dilengkapi dengan papan informasi yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut mencakup informasi mengenai anggaran yang berasal dari ADD maupun swadaya masyarakat, serta waktu pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dalam Musrenbangdes. Sedangkan dalam

penatausahaan, pengelolaan keuangan desa harus memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP, yaitu aplikasi SISKEUDEDES (Diansari dan Eka, 2015).

c. Pertanggungjawaban

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan berkaitan dengan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut disampaikan secara periodik, baik setiap semester maupun tahunan, kepada Bupati/Walikota dan juga kepada Badan Pengawasan Daerah (BPD).

5. Indikator Pengelolaan dana desa

a. Tahap perencanaan

Proses perencanaan merupakan tahapan awal dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa akan menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berkenaan dengan menentukan skala prioritas. Tahap perencanaan ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKP desa) dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. (Andini,A.& Ahmad,H. 2020)

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan proses realisasi kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana anggaran dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas (Badrudin,R., & Siregar, H. 2021).

c. Tahap penata usahaan

Pada tahap penatausahaan, yang dilakukan oleh bendahara desa, setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dengan baik, serta dilakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara

teratur. Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank adalah alat yang digunakan oleh bendahara desa untuk melakukan penatausahaan penerimaan. Bendahara desa juga diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada kepala desa setiap bulan, dengan batas waktu paling lambat 10 hari setelah bulan yang bersangkutan berakhir (Veti Kartika Sari, et al., 2021).

d. Tahap pelaporan Dan tahap pertanggungjawaban.

Pada tahap pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati, yang terdiri dari dua laporan. Laporan pertama adalah laporan semester pertama, yang berisi realisasi APBDesa dan harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan kedua adalah laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDesa secara keseluruhan, termasuk pertanggungjawaban operasional dalam pengelolaan ADD yang dilakukan oleh kepala desa. Semua penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, baik secara formil maupun materil (Veti Kartika Sari, et al., 2021).

B. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Keberhasilan pertanggungjawaban yang baik oleh pemerintah desa dapat terlihat melalui transparansi yang luas, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah

oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut adalah definisi dan pengertian transparansi menurut beberapa sumber buku:

- a. Menurut (mardiasmo, 2014), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat yang membutuhkan.
- b. Menurut (Tanjung, 2011), transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat, dengan pertimbangan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui informasi secara terbuka dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Sedangkan menurut permendagri No. 113 Tahun 2014, mengartikan transparansi sebagai kebebasan setiap orang untuk mengakses informasi mengenai kebijakan, proses pembuatannya, pelaksanaannya, dan hasil yang telah dicapai.
- d. Pengertian lain menurut (Mahmudi, 2015) transparansi adalah keterbukaan suatu organisasi dalam memberikan informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan operasional dalam pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.
- e. Peraturan dalam negeri 113 2014 pasal 4 ayat 7 mengatur bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan dana desa.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, di mana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi yang relevan perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang tersedia harus memadai agar bisa dipahami dan dipantau dengan jelas. Transparansi

berarti menjalankan tugas dengan mengungkapkan informasi yang bersifat material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini adalah masyarakat desa.

Dengan adanya transparansi, setiap orang memiliki akses bebas untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, seperti kebijakan yang diambil, proses pelaksanaan kegiatan anggaran dana desa, dan hasil yang dicapai dari pengelolaan dana tersebut.

Transparansi juga menjamin kebebasan bagi individu atau kelompok untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintah, mengingat keputusan-keputusan penting yang diambil oleh pemerintah desa dapat berdampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menyediakan informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pengelolaan dana desa meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan, yang mana pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa, yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini agar program kerja yang disusun dan dirancang dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki desa tersebut. Selain itu, pemerintah desa harus memastikan pencatatan yang baik atau setidaknya melakukan pembukuan transaksi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa (Weny Ultaifah, 2017).

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai pengelolaan keuangan dana desa. Hal ini

didasarkan pada pemahaman bahwa masyarakat desa berhak mengetahui semua yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, sehingga tercipta keterbukaan baik dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat desa. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa, masyarakat dapat memperoleh informasi yang aktual dan faktual, yang dapat digunakan untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang tercapai dengan yang direncanakan apakah sesuai atau tidak.
2. Menilai apakah ada tidak unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti diantara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan pihak lain yang terkait.

2. Karakteristik Transparansi

Prinsip transparansi mengharuskan pelaksana untuk bersikap terbuka dalam setiap tindakannya, siap menerima kritik atau masukan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dijelaskan melalui beberapa karakteristik transparansi menurut Weny Ultaifah (2017):

a. Informatif (*informativeness*)

Prinsip transparansi mengharuskan pelaksana untuk bersikap terbuka dalam setiap tindakannya, siap menerima kritik atau masukan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dijelaskan melalui beberapa karakteristik transparansi menurut Weny Ultaifah (2017):

1. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari penundaan dalam pengambilan keputusan tersebut.
2. Memadai. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang mencakup pengungkapan informasi yang cukup terkait hal-hal material.
3. Jelas. Informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman.
4. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan pihak yang menerima serta memanfaatkan informasi tersebut. Akurasi juga berarti bahwa informasi tersebut benar-benar mencerminkan maksud yang ingin disampaikan.
5. Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan harus dapat dibandingkan antara periode waktu yang berbeda dan dengan instansi yang sejenis. Hal ini memungkinkan perbandingan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
6. Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan.

b. Keterbukaan (*Openess*)

Keterbukaan dalam informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan akses data yang tersedia untuk publik. Setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan.

c. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua yaitu, pengungkapan wajib, dan pengungkapan sukarela. Adapun indikator pengungkapan yaitu (Weny Ultaifah, 2017):

1. Kondisi keuangan. Menyajikan gambaran utuh mengenai kondisi keuangan organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
2. Susunan pengurus. Menunjukkan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menggambarkan pembagian tugas dan bagaimana kegiatan yang berbeda-beda tersebut dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan.
3. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan.

3. Indikator transparansi

Dalam penerapan prinsip transparansi, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan desa secara terbuka, mengingat dana tersebut adalah milik rakyat dan merupakan dana publik yang harus diketahui serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pihak yang mengelola keuangan desa wajib menyampaikan informasi terkait penggunaan dana tersebut kepada masyarakat dengan cara yang terbuka. Dengan adanya keterbukaan ini, diharapkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat. Indikator transparansi menurut Sulisty (2019) adalah:

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
- b. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan membayar uang suap.

- c. Kemudahan akses informasi dan meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media masa dan lembaga non pemerintah.

4. Manfaat transparansi

Menurut (Medina, 2012), terdapat keuntungan yang diperoleh dengan adanya transparansi keuangan, yaitu :

- a. Mengurangi ketidakpastian: Transparansi keuangan membantu menekan tingkat ketidakpastian yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal dan perekonomian secara keseluruhan, sehingga kebutuhan akan penyesuaian kebijakan di masa mendatang dapat diminimalkan.
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah: Dengan adanya keterbukaan informasi, legislatif, media, dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan, pelaksanaannya, serta penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara lebih efektif. Hal ini mendorong pejabat publik untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan berkontribusi dalam pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. Meningkatkan kepercayaan publik: Transparansi keuangan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memperbaiki hubungan antara pemerintah dan publik, serta memudahkan masyarakat dalam memahami dan mendukung kebijakan yang diterapkan.
- d. Meningkatkan iklim investasi: Kejelasan informasi mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah melalui transparansi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional, sehingga mendorong peningkatan investasi.

5. ¹ Bentuk pelaksanaan transparansi publik

Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan aktivitas yang dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat. Keterbukaan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan dan pengendalian. Informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik harus disediakan secara jelas dan mudah diakses oleh pihak-pihak

yang berkepentingan. Selain itu, transparansi menuntut aparatur pelayanan publik untuk memiliki pemahaman yang memadai terhadap permasalahan yang dihadapi serta informasi yang relevan dengan pelaksanaan pelayanan. Menurut (Ratminto dan Winarsih, 2005), bentuk pelaksanaan transparansi dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi dalam manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik mencakup kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat. Semua kegiatan ini harus diinformasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Prosedur pelayanan menunjukkan tahapan yang jelas dan pasti, serta cara-cara yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak rumit, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Prosedur ini juga harus ditampilkan dalam bentuk flow chart yang jelas di ruang pelayanan.
- c. Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis maupun administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif, harus seminimal mungkin dan terlebih dahulu dikaji agar benar-benar sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Semua persyaratan yang bersifat duplikasi antar instansi terkait harus dihilangkan.
- d. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikenakan sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan. Besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi mengenai biaya pelayanan dilakukan dengan mengurangi pertemuan langsung antara pemohon dan pemberi pelayanan. Pembayaran sebaiknya dilakukan melalui unit yang mengelola keuangan atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah atau unit

pelayanan. Setiap pungutan yang dikenakan kepada masyarakat harus disertai dengan bukti resmi yang sesuai dengan jumlah yang dibayar.

- e. Waktu penyelesaian pelayanan merujuk pada jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pelayanan publik, mulai dari pemenuhan persyaratan teknis dan administratif hingga penyelesaian pelayanan tersebut. Unit pelayanan di instansi pemerintah harus memberikan pelayanan berdasarkan urutan permintaan, artinya yang pertama kali mengajukan pelayanan harus dilayani lebih dahulu.

C. Akuntabilitas

1. Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai **accountability** atau **accountable**, berarti dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja seseorang, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima penjelasan atau pertanggungjawaban tersebut.

Walaupun akuntabilitas dan **responsibilitas** sering dianggap sama dan keduanya berhubungan, sebenarnya mereka berbeda. Menurut Sjamisari (2016), **responsibilitas** berkaitan dengan penilaian terhadap standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar tersebut sudah sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jika sudah sesuai, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. **Responsibilitas** lebih berfokus pada faktor internal organisasi, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang tersebut kepada pihak eksternal.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 24 huruf g), akuntabilitas adalah prinsip yang mengharuskan setiap hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa untuk

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam instansi pemerintah, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut (Sri Wahyuni Dan Darmawan Sriyanto, 2023):

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan.
- b. Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
- e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

3. Macam –macam Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2015):

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
Akuntabilitas kejujuran dan hukum merupakan kewajiban lembaga publik untuk menjalankan tugas secara jujur serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial berkaitan dengan tanggung jawab lembaga publik dalam mengelola organisasi secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program menekankan pada penilaian terhadap pencapaian tujuan program yang telah direncanakan, termasuk pertimbangan atas alternatif program yang mampu memberikan hasil terbaik dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merupakan pertanggungjawaban pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, atas kebijakan yang ditetapkan kepada DPR/DPRD serta kepada masyarakat secara luas.

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial adalah tanggung jawab lembaga publik dalam mengelola dan menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta memastikan tidak terjadi pemborosan, kebocoran anggaran, maupun praktik korupsi.

Prinsip-prinsip akuntabilitas perlu diterapkan guna memenuhi kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, parapemegang amanah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan yang dilakukan dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan desa kepada pihak yang tepat, yaitu masyarakat setempat. Tingkat akuntabilitas serta pelaksanaan pengelolaan dana desa menuntut aparatur desa untuk menjalankan tahapan pengelolaan secara sistematis, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu (Weny Ultafiah, 2017) :

1. Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (Dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada pemerintah MPR.

2. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

1. Indikator Akuntabilitas

Keberhasilan aparat desa dalam menerapkan akuntabilitas dapat dinilai melalui beberapa aspek, antara lain pertanggungjawaban yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah pusat, serta pertanggungjawaban yang dilakukan secara baik dan terbuka kepada masyarakat setempat. Untuk menilai tingkat keberhasilan tersebut, (Sulisty, 2019) merumuskan beberapa indikator akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Keputusan yang diambil harus didokumentasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh setiap warga yang memerlukan informasi tersebut.
- b. Proses pengambilan keputusan harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, baik berdasarkan prinsip administrasi yang benar maupun nilai yang dianut oleh para pemangku kepentingan.
- c. Kebijakan yang ditetapkan harus memiliki sasaran yang jelas serta selaras dengan visi dan misi organisasi, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

- d. Tersedianya mekanisme yang menjamin terpenuhinya standar secara konsisten, termasuk kejelasan kelayakan target operasional yang ditetapkan serta prioritas dalam pencapaian target tersebut.

D. Partisipasi Masyarakat

1. Definisi partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi, yang diwujudkan melalui berbagai bentuk aktivitas sosial. Partisipasi ini mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan. Dalam konteks lain, partisipasi juga dapat dipahami sebagai tingkat keyakinan masyarakat terhadap kemudahan dalam berpartisipasi, yang ditandai dengan kemudahan untuk dipahami, fleksibilitas dalam pelaksanaan, serta kemudahan untuk dilakukan kapan pun dan di mana pun.

Partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong dan mendukung implementasi konsep kesejahteraan, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi hal yang esensial mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara demokratis seperti Indonesia.

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat berperan penting dalam pembangunan negara kesejahteraan. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dapat memengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan negara. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat mempercepat dan memperluas akses

publik terhadap sumber daya serta layanan kesejahteraan yang disediakan pemerintah, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial (Sofiyah Yatimah Tahir et al., 2020).

2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu maupun kelompok masyarakat itu sendiri. Faktor ini mencakup karakteristik demografis dan sosial, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, serta lama tinggal di suatu wilayah. Sementara itu, faktor eksternal yang memengaruhi partisipasi masyarakat meliputi aspek kepemimpinan dan komunikasi. Faktor eksternal juga mencakup peran para pemangku kepentingan *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap pelaksanaan program, seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta konsultan atau fasilitator (Muh. Fachrun et al., 2020).

3. Indikator partisipasi masyarakat

Indikator partisipasi masyarakat mencakup partisipasi fisik, partisipasi buah pikiran, partisipasi dana, dan partisipasi keterampilan. Partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan serta permasalahan pembangunan yang terjadi di lingkungannya, termasuk cara terbaik untuk mengatasinya.

Partisipasi fisik diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan yang mendukung kemajuan program. Partisipasi buah pikiran merupakan kontribusi masyarakat dalam

bentuk ide, gagasan, atau pendapat yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan program. Partisipasi dana berupa sumbangan finansial dari masyarakat guna mendukung pencapaian tujuan program. Sementara itu, partisipasi keterampilan adalah keterlibatan masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan kegiatan program (Sofiyah Yatimah et al., 2020).

E. Kerangka Berfikir

1. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa

Transparansi merupakan penyampaian informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan pertimbangan bahwa masyarakat berhak memperoleh pengetahuan yang lengkap mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan transparansi adalah agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai seluruh kegiatan pemerintah secara langsung dan menyeluruh. Tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pengelolaan tersebut berlangsung dengan baik. Dengan kata lain, keterbukaan informasi memiliki dampak positif terhadap pengelolaan dana desa, karena pengelolaan dana desa dapat berjalan efektif jika transparansi diterapkan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengelola dana. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syadza Hanin et al. 2023), yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

2. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa

Akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, terutama kegiatan yang menggunakan anggaran. Setiap pelaksanaan kegiatan harus

dilaporkan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada pemerintah yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah desa bertindak sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah, yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Yuli Lestari Labangu et al., 2022).

Dengan demikian, jika masyarakat menilai bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa cukup baik, maka pengelolaan dana desa juga dianggap baik dan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya (Angelia et al., 2020).

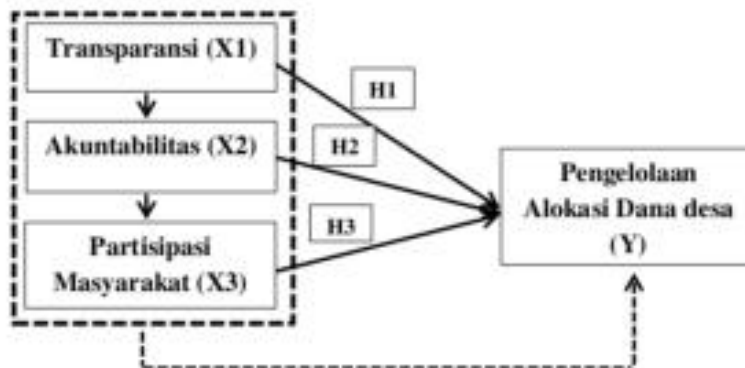
3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap alokasi dana desa

Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa, karena berfungsi sebagai sarana pengawasan sekaligus sebagai saluran aspirasi masyarakat. Berdasarkan perspektif *stewardship theory*, masyarakat sebagai *principal* menjadi tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pemerintah secara optimal, dibutuhkan partisipasi masyarakat yang mampu memberikan masukan, penilaian, serta pengawasan terhadap kinerja aparatur desa (*steward*).

Dalam pengelolaan alokasi dana desa, partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisnya penggunaan dana, karena aspirasi masyarakat dapat dijadikan acuan sasaran penggunaan dana tersebut. Selain itu, masyarakat sebagai *principal* memiliki hak untuk mengevaluasi, menilai, dan mengawasi pengelolaan alokasi dana desa agar pengelolaan

dana berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, apabila prinsip partisipasi masyarakat diterapkan dengan baik, pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Angelia et al., 2020).

Berdasarkan kerangka berfikir diatas disusun lah kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka konseptual

Keterangan :

- > Pengaruh parsial
- - - - -> Pengaruh simultan

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat tidak mutlak atau bersifat sementara terhadap rumusan suatu masalah penelitian. Hipotesis saat dianggap paling mendekati kebenaran. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. H_1 : Tingkat transparansi pemerintah desa berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa Di desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
2. H_2 : Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa Di desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
3. H_3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa Di desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
4. H_4 : Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa Jetis kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat sistematis, terencana, dan terstruktur secara jelas sejak tahap awal hingga penyusunan desain penelitian. Penelitian kuantitatif menekankan pada penggunaan angka, baik dalam pengumpulan data, analisis, maupun penyajian hasil penelitian. Metode ini juga dikenal sebagai metode tradisional karena telah digunakan dalam waktu yang lama dan telah menjadi praktik yang mapan dalam penelitian. Selain itu, metode kuantitatif sering disebut metode ilmiah karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Disebut kuantitatif karena penelitian ini menggunakan angka dan analisis statistik dalam pengolahan datanya. Penelitian kuantitatif tidak hanya banyak digunakan dalam ilmu alam, tetapi juga mendominasi penelitian di bidang ilmu sosial. Prinsip-prinsip teoritis metode kuantitatif meliputi konstruksi pengetahuan dan prosedur yang eksplisit, eksak, dan formal dalam mendefinisikan serta mengukur konsep dan variabel penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif karena memungkinkan pengukuran variabel secara tepat dan obyektif, serta hasil yang dapat digeneralisasi ke populasi lebih luas. Pendekatan ini juga mendukung pengujian hipotesis melalui data numerik yang dapat dianalisis secara statistik, memberikan analisis mendalam, dan memudahkan replika penelitian. Dengan menggunakan sampel yang besar dan teknik statistik, penelitian kuantitatif memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan dan mudah dipahami.

B. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini akan menguji 3 variabel bebas dan satu variabel terikat. Berikut ini penjelasan variabel dalam penelitian ini :

1. Variabel Bebas (Independent Variabel)

- a) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan pengoperasian sumber daya umum kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat (Mardiasmo, 2014).

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan (Mardiasmo, 2017).

c) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat pada proses pengelolaan keuangan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tahap evaluasi yang dilaksanakan serta mengambil bagian dalam bentuk aktivitas masyarakat (Sofiyah Yatimah et al., 2020).

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu pengelolaan alokasi dana desa. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana desa perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (PP No.72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11).

C. Instrumen penelitian

1. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati. Setiap fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner kemudian diukur menggunakan skala likert. Skala likert adalah metrik untuk mengukur opini, penilaian, dan pandangan mengenai kejadian tertentu. Pada penelitian ini, responden menandai

pilihannya pada kolom preferensi respons yang disediakan peneliti pada kuesioner yang dibagikan. Tingkatan berikut ini dimasukkan dalam kuesioner yang digunakan oleh peneliti yaitu:

Tabel 3.1
Alternatif jawaban responden

Tanda	Keterangan	Skor
SS	Sangat setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu-Ragu	3
TS	Tidak setuju	2
STS	Sangat tidak setuju	1

Tabel 3.2
Tabel pengukuran variabel/ indikator variabel

No	Variabel	Pengukuran/indikator	No item kuesioner
	Transparansi	1. Penyediaan informasi yang transparan Menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai tanggung jawab serta kewajiban pihak yang berwenang. 2. Mekanisme pengaduan Menyusun dan menerapkan mekanisme	1-3 (3 item)

		pengaduan bagi masyarakat apabila terdapat pelanggaran peraturan atau upaya meminta pembayaran suap. 3. Kemudahan akses dan arus informasi Mempermudah akses informasi serta meningkatkan aliran informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non-pemerintah. (Sulisty, 2019).	
2	Akuntabilitas	1. Dokumentasi keputusan Keputusan yang diambil harus didokumentasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh setiap warga yang membutuhkannya. 2. Kepatuhan terhadap etika dan nilai Proses pengambilan	4-7 (4 item)

		keputusan harus sesuai dengan standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, termasuk prinsip administrasi yang benar serta nilai yang dipegang oleh para pemangku kepentingan. 3. Kejelasan sasaran kebijakan Kebijakan yang ditetapkan harus memiliki sasaran yang jelas dan selaras dengan visi, misi, serta standar organisasi yang berlaku. 4. Mekanisme pengendalian dan konsistensi standar Tersedianya mekanisme yang menjamin terpenuhinya standar secara konsisten, termasuk kelayakan target operasional yang	
--	--	---	--

		telah ditetapkan serta prioritas dalam pencapaian target tersebut. (Sulisty, 2019).	
	Partisipasi masyarakat desa	1. Partisipasi fisik 2. Partisipasi buah pikir 3. Partisipasi dana dan 4. Partisipasi keterampilan (Sofiyah Yatimah et al., 2020).	8-11 (4 item)
	Pengelolaan alokasi dana desa	1. Tahap perencanaan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap penatausahaan 4. Tahap pelaporan 5. Tahap pertanggungjawaban (Veti Kartika sari et al ., 2021).	12 -16 (5 item)

2. Validitas dan reliabilitas instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan (kuesioner). Kuesioner dinyatakan valid jika nilai koefisien korelasi hitung (r hitung) lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel) atau nilai Sig. Lebih kecil dari 0,05 (Sig $<$ 0,05) (Field, 2018, p. 53). Pada penelitian ini perhitungan uji validitas instrumen menggunakan nilai Sig. Berikut adalah hasil perhitungan uji validitas instrumen menggunakan software SPSS 26.0 (Sugiyono, 2022).

Tabel 3.3
Tabel Hasil Uji Validitas Variabel X1

No	Pertanyaan Kuesioner	Uji Validitas Pearson			Keterangan
		kode	r hitung	r tabel	Validitas
1	Pemerintah desa Jetis memberikan informasi yang jelas mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan alokasi dana desa	X1.1	0,835	0,278	valid
2	Pemerintah desa Jetis menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.	X1.2	0,861	0,278	valid
3	Pemerintah desa jetis menjalin komunikasi dengan lembaga non-	X1.3	0,920	0,278	valid

7	pemerintah (LSM) dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.				
---	--	--	--	--	--

Sumber : Data Penelitian diolah menggunakan Software SPSS 27.0 tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada tabel di atas maka dapat diketahui informasi sebagai berikut Kuesioner Penelitian X1 sebanyak 3 item keseluruhan memiliki r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,278). Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian sudah dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 3.4
Tabel Hasil Uji Validitas Variabel X2

No	Kuesioner	Uji Validitas Pearson			Keterangan
		kode	r hitung	r tabel	Validitas
1	Keputusan-keputusan pemerintah desa Jetis dibuat secara tertulis dan dapat diakses oleh masyarakat desa.	X2.1	0,754	0,278	valid
2	Pembuatan keputusan memperhatikan nilai-nilai masyarakat dan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder) .	X2.2	0,741	0,278	valid
3	Kebijakan yang diambil oleh aparatur desa memiliki sasaran yang jelas dan dapat dipahami masyarakat desa Jetis.	X2.3	0,854	0,278	valid

4	Pelaksanaan program pada desa jetis dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.	X2.4	0,742	0,278	valid
---	---	------	-------	-------	-------

Sumber : Data Penelitian diolah menggunakan Software SPSS 27.0 tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada tabel di atas maka dapat diketahui informasi sebagai berikut Kuesioner Penelitian X2 sebanyak 4 item keseluruhan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,278). Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian sudah dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 3.5
Tabel Hasil Uji Validitas variabel X3

No	Pertanyaan Kuesioner	Uji Validitas Pearson			Keterangan
		kode	r hitung	r tabel	Validitas
1	Masyarakat desa Jetis terlibat secara langsung dalam kegiatan pembangunan yang didanai dari dana ADD	X3.1	0,843	0,278	valid
2	Pendapat masyarakat desa Jetis diperhitungkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dana desa.	X3.2	0,812	0,278	valid
3	Sumbangan dana dari masyarakat desa jetis dikelola secara transparan oleh pemerintahan desa Jetis.	X3.3	0,894	0,278	Valid

4	Pemerintah desa melibatkan warga yang memiliki keahlian tertentu dalam pelaksanaan program dana desa.	X3.4	0,765	0,278	Valid
---	---	------	-------	-------	-------

Sumber : Data Penelitian diolah menggunakan Software SPSS 27.0 tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada tabel di atas maka dapat diketahui informasi sebagai berikut Kuesioner Penelitian X3 sebanyak 4 item keseluruhan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,278). Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian sudah dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 3.6
Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Y

No	Kuesioner	Uji Validitas Pearson			Keterangan
		kode	r hitung	r tabel	Validitas
1	Musyawarah desa dilakukan secara terbuka dalam merumuskan program yang akan didanai.	Y.1	0,724	0,278	valid
2	Pelaksanaan program yang didanai dana desa dilakukan secara transparan atau terbuka.	Y.2	0,818	0,278	valid
3	Pencatatan dan dokumentasi keuangan desa dilakukan dengan tertib dan sistematis.	Y.3	0,775	0,278	valid

4	Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa disusun secara rutin	Y.4	0,842	0,278	Valid
5	Terdapat forum atau pertemuan untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa.	Y.5	0,756	0,278	Valid

Sumber : Data Penelitian diolah menggunakan Software SPSS 27.0 tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada tabel di atas maka dapat diketahui informasi sebagai berikut Kuesioner Penelitian Y sebanyak 5 item keseluruhan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,278). Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian sudah dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono, 2022, (hal.130) Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu instrumen yang merupakan alat pengukuran konstruk atau variabel. Instrumen yang variabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama Pengujian reliabilitas pada penelitian ini diukur dengan menggunakan koefisien Cronbach alpha dengan kriteria pengujian Suatu instrumen dikatakan handal (reliabel) jika nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Field, 2018, hal.53). Berikut adalah hasil perhitungan uji Reliabilitas instrumen menggunakan software SPSS 27.0.

Tabel 3.7
Tabel Uji Reliabilitas kuesioner

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
X1	0,842	3	Reliabel
X2	0,769	4	Reliabel
X3	0,837	4	Reliabel
Y	0,843	5	Reliable

Keterangan : Reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60. (Field, 2018, hal.53)

Berdasarkan hasil perhitungan uji Reliabilitas pada tabel di atas maka dapat diketahui informasi sebagai berikut : Variabel Penelitian X1, X2, X3 dan Y memiliki nilai Cronbach's Alpha seluruhnya lebih besar dari 0.60. berdasarkan hal tersebut maka kuesioner penelitian dinyatakan memenuhi asumsi reliabilitas dan dinyatakan reliabel sehingga dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang nantinya akan menjadi bahan penelitian yang memiliki ciri berupa karakteristik yang sama. Populasi pada penelitian ini adalah semua masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa yang berjumlah 850 yang merupakan masyarakat desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tetapkan.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang dapat mewakili populasinya. Sugiyono menjelaskan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan

diteliti yang mampu mewakili populasinya. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* atau pemilihan sampel bertujuan, karena sampel yang harus memenuhi penentuan kriteria-kriteria tertentu yang digunakan dalam penelitian ini.

Yang menjadi kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu aparatur desa yang berkedudukan sebagai kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD), sekretaris desa, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala badan usaha milik desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan dan kepala dusun serta beberapa ketua RT setempat serta perwakilan masyarakat dari tokoh agama dengan jumlah 50 orang.

3. Prosedur penelitian

Prosedur penelitian adalah serangkaian langkah terstruktur yang ditempuh oleh peneliti guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah

Langkah awal dalam penelitian ini dimulai dengan mengenali permasalahan melalui studi pendahuluan dan kajian pustaka untuk mengidentifikasi celah penelitian yang berkaitan dengan struktur pengelolaan dana desa dan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Dari hasil kajian tersebut, peneliti menyusun rumusan masalah, tujuan, serta batasan penelitian secara sistematis.

2. Studi literatur

Peneliti melakukan penelaahan terhadap literatur yang relevan, baik berupa teori-teori mengenai struktur pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, ditelaah pula hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung pembentukan dasar teori dan kerangka berpikir dalam penelitian ini.

3. Perumusan Hipotesis

Perumusan hipotesis dilakukan setelah dilakukan studi literatur atau pengkajian literatur yang telah disusun sebelumnya. Pada umumnya penarikan hipotesis dituliskan untuk membangun asumsi atau kesimpulan sementara dari penelitian yang sekarang dilakukan berikut dugaan pada penelitian ini :

a) Hipotesis 1 (H_1)

Diduga tingkat transparansi pemerintah desa berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

b) Hipotesis 2 (H_2)

Diduga akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

c) Hipotesis 3 (H_3)

Diduga partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

d) Hipotesis 4 (H_4)

Diduga transparansi, Akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

4. Penyusunan Instrumen Penelitian

Pada penyusunan instrumen penelitian pada penelitian ini didasarkan pada indikator-indikator variabel yang telah ditetapkan , yaitu transparansi (X1), akuntabilitas (X2), partisipasi masyarakat (X3), dan pengelolaan alokasi dana desa (Y).

5. Uji validitas dan reliabilitas

Sebelum penyebaran secara luas, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel (kuesioner) untuk mengetahui sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. .

6. Penentuan populasi dan sampel

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat dan aparatur desa jetis yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Dan pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling.

7. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner, data ini mencerminkan persepsi dan pendapat aparatur desa dan masyarakat terkait transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan alokasi dana desa.

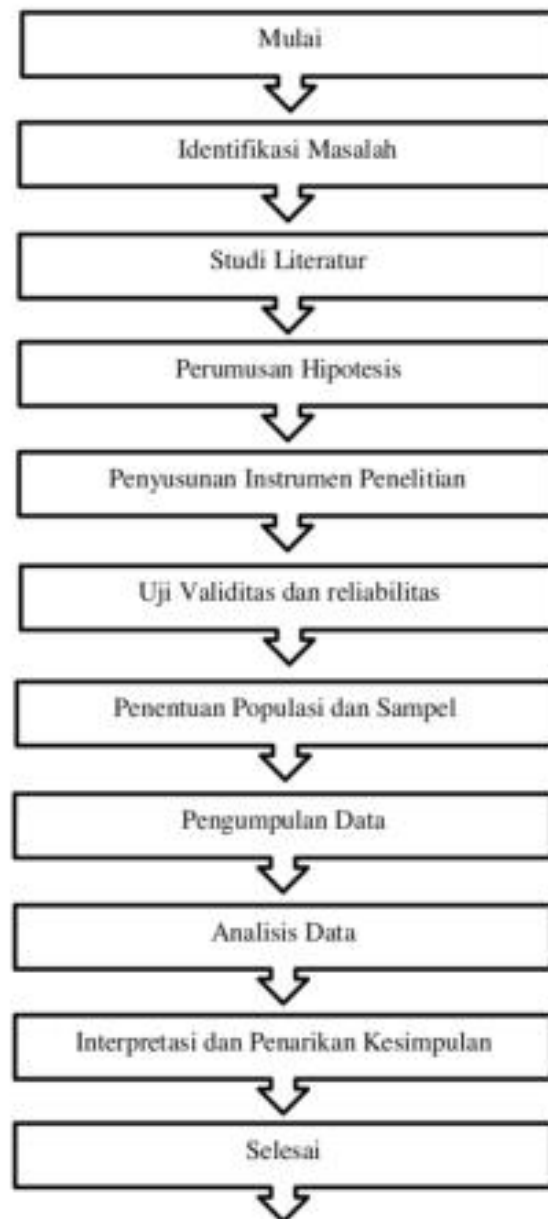
8. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Analisis meliputi uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2).

9. Interpretasi dan penarikan kesimpulan

Hasil yang diperoleh dari analisis data diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti membandingkan temuan dengan teori yang ada serta studi terdahulu, untuk memberikan penjelasan terhadap pola hubungan yang ditemukan dalam data.

Dan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi, disusun kesimpulan yang merangkun temuan utama dari penelitian ini serta saran yang bermanfaat bagi aparatur desa.



Gambar 3.1
Prosedur Penelitian

F. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yakni data yang diperoleh langsung melalui penyebaran dan pengumpulan data kuesioner dan juga hasil observasi. Dan untuk data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui entitas lain yang dapat diyakini kebenaran dan keabsahan datanya.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2022) observasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi bertujuan untuk memperoleh informasi dan untuk menggambarkan kegiatan berdasarkan perspektif individu.

Pada teknik pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung ke balai desa yang berada di desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

b. Kuesioner

Pada teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuesioner. Menurut (Wijaya, 2019), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan formulis pernyataan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mengumpulkan tanggapan atau tanggapan yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, kuesioner akan disebarkan kepada perangkat desa dan perwakilan dari masyarakat desa Jetis.

c. Study pustaka

Melakukan pengumpulan data dengan informasi yang didapatkan dari sumber internet,jurnal,serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

G. Teknis Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan bantuan aplikasi SPSS versi 2025. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan sebagai berikut

1. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi linier berganda agar memperoleh hasil yang bersifat Best Linear unbiased estimation (BLUE). Bersifat BLUE artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka harus dipenuhi persyaratan asumsi klasik sebagai berikut

a. Uji normalitas

Uji normalitas adalah suatu cara yang dilakukan untuk melihat apakah dalam penelitian telah terdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi, normalitas diperlukan pada nilai residual, bukan pada masing-masing variabel penelitian. Model regresi yang ideal memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas ini dilakukan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik.

1. Analisis grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Jika puncak kurva berada pada titik 0 dan membagi atau mempunyai sisi yang sama yang tidak melenceng ke kiri atau ke kanan.

Namun, hanya mengandalkan histogram bisa menjadi membingungkan, terutama jika jumlah sampel kecil. Sebagaimana dijelaskan oleh (Ghozali, 2018), terdapat metode lain yang diterapkan, yaitu dengan menggunakan normal probability plot. Metode ini membandingkan distribusi kumulatif dari data dengan distribusi normal. Menurut (Ghozali,

2018), dasar pengambilan keputusan untuk hasil uji normalitas dapat didasarkan pada hal-hal berikut :

- a) Apabila data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat dilakukan residual adalah uji statistik non-parametik kolmogorov-smirnov test (K-S). Menurut (Ghozali, 2021), uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H_0 = Data residual terdistribusi normal

H_a = Data residual tidak terdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut :

- a) Jika nilai signifikansi Kolmogorov-smirnov (Asymp.Sig.) lebih besar dari ($\alpha = 5\%$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut (Ghozali, 2018) untuk memastikan apakah model regresi mengidentifikasi adanya korelasi antar variabel independen digunakan uji multikolinieritas. Tidak boleh ada hubungan apapun antara variabel independen dalam model regresi yang sesuai. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi, dapat dilakukan dengan melihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika terdapat nilai tolerance $>0,10$ atau $VIF < 10,00$ maka dikatakan tidak ada multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan varian residu pengamatan yang berbeda dalam model regresi. Heteroskedastisitas terjadi jika grafik plot menampilkan pola titik-titik bergelombang atau melebar yang diikuti dengan penyempitan. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas yakni serat titik-titik menyebar keatas dan kebawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruh hubungan anatara kedua atau lebih variabel. Teknik analisis data yang digunakan melalui alat uji statistik yakni persamaan regresi linier berganda (Ghozali, 2018). Adapun rumus yang digunakan untuk analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = pengelolaan alokasi dana desa

a = konstanta

b₁ = koefisien transparansi

b₂ = koefisien akuntabilitas

b₃ = koefisien partisipasi masyarakat

X₁ = transparansi

X₂ = akuntabilitas

X₃ = partisipasi masyarakat

e = variabel pengganggu

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diuji berkaitan dengan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Model regresi yang telah memenuhi asumsi-asumsi klasik akan digunakan untuk menganalisis data melalui pengujian hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Uji t (Uji parsial)

Menurut (Ghozali, 2018), uji t atau uji parsial bertujuan untuk menguji pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependennya. Pengujian ini dengan taraf signifikansi 5 % (0,05) dapat disimpulkan jika probabilitas $<0,05$, maka H_0 ditolak, berarti masing masing variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan jika probabilitas $>0,05$ maka H_0 diterima, masing masing variabel bebas secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Farli Liwe 2013)

b. Uji f (uji simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan (bersama – sama) berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F merupakan pengujian signifikan yang digunakan untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh variabel independen (bebas) yaitu Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2), partisipasi masyarakat (X_3) terhadap variabel dependen (terikat) yaitu pengelolaan dana desa. Pengujian ini dengan taraf signifikansi 5 % (0,05) dapat disimpulkan jika probabilitas $<0,05$, maka H_0 ditolak, berarti masing masing variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan jika probabilitas $>0,05$ maka H_0 diterima, masing masing variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Farli Liwe 2013) .

4. Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali, 2018) koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh model. Antara nol dan satu merupakan kisaran koefisien determinasi. Jika nilai koefisien determinasi yang mendekati angka nol (0) berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen terbatas. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati angka (1) berarti semakin kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Deskripsi data hasil penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari sejumlah responden yang terlibat dalam pengisian angket penelitian. Responden terdiri dari masyarakat desa yang terlibat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung. Berikut penyajian hasil analisis deskriptif terhadap variabel variabel penelitian, yaitu Transparansi (X1), akuntabilitas (X2), partisipasi masyarakat (X3), dan pengelolaan alokasi dana desa (Y). Berikut adalah data dari seluruh responden yang terlibat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk :

Tabel 4.1

Distribusi responden berdasarkan jabatan

Jabatan	Frekuensi	Persen (%)
Aparatur desa	8	16,00
Masyarakat desa	30	60,00
Anggota karang taruna desa	8	16,00
Tokoh-tokoh desa	4	8,00
Total	50	100,00

Berdasarkan tabel distribusi responden menurut jabatan, diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 50 orang. Responden yang paling dominan berasal dari masyarakat desa, yaitu sebanyak 30 orang atau sebesar 60,00%. Hal ini menunjukkan

bahwa masyarakat desa merupakan pihak yang paling banyak terlibat sebagai responden, sehingga persepsi dan penilaian masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa dapat tergambarkan secara luas.

Responden yang berasal dari aparatur desa berjumlah 8 orang atau sebesar 16,00%. Aparatur desa memiliki peran penting dalam penelitian ini karena mereka terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa.

Responden dari anggota karang taruna desa juga berjumlah 8 orang atau sebesar 16,00% keterlibatan karang taruna mencerminkan partisipasi generasi muda desa dalam pembangunan serta pengawasan kegiatan desa.

Sementara itu, responden yang berasal dari tokoh-tokoh desa berjumlah 4 orang atau sebesar 8,00%. Tokoh desa memiliki peran strategis sebagai pihak yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan serta memiliki pengalaman terhadap kondisi sosial dan kebijakan desa.

a. Deskripsi data variabel independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2020, hal.69).

Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas yaitu transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Dan partisipasi masyarakat (X3). Berikut table 15 dari jawaban kuesioner yang dikirimkan responden untuk variabel transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Dan Partisipasi Masyarakat (X3). Berikut adalah data variabel bebas dalam penelitian ini :

1) Transparansi (X1)

Sebanyak 16 pertanyaan kuesioner disebarkan kepada seluruh masyarakat desa yang terlibat dalam pengelolaan

alokasi dana desa, responden dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan alokasi dana desa yang berada di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Berikut tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden untuk variabel Transparansi (X1) :

Tabel 4.2
Frekuensi variabel transparansi

Item	Skor jawaban										Rata-rata nilai
	1 (STS)		2 (TS)		3(RR)		4(S)		5(SS)		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	0	0	0	0	3	0,06	23	0,46	24	0,48	3,92
X1.2	0	0	0	0	7	0,14	24	0,48	19	0,38	3,8
X1.3	1	0,02	5	0,10	7	0,14	27	0,54	10	0,20	3,82

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas :

- a) Pada pertanyaan pertama (X1) yaitu tentang pemerintah Desa Jetis memberikan informasi yang jelas mengenai siapa saja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan alokasi dana desa, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,92% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,48% dan jawaban setuju 0,46% dan memberikan jawaban ragu-ragu 0,06%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 24 orang (0,48%).
- b) Pada pertanyaan kedua (X1.2) pada pertanyaan

kedua (X1.2) yaitu tentang pemerintah desa menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,08% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,38% dan jawaban setuju 0,48% dan memberikan jawaban ragu-ragu 0,14%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 24 orang (0,48%).

- c) Pada pertanyaan ketiga (X1.3) pada pertanyaan ketiga (X1.3) yaitu tentang pemerintah desa menjalin komunikasi dengan lembaga non-pemerintah (LSM) dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,82% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,20% dan jawaban setuju 0,54% dan memberikan jawaban ragu-ragu 0,14% dan jawaban tidak setuju 0,10% dan jawaban sangat tidak setuju 0,02%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 27 orang (0,54%).

2) Akuntabilitas (X2)

Sebanyak 16 pertanyaan kuesioner disebarkan kepada masyarakat desa yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa, responden dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Berikut adalah tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden untuk variabel akuntabilitas (X2):

Tabel 4.3

Frekuensi variabel akuntabilitas

Item	Skor jawaban										Rata-rata nilai
	1 (STS)		2 (TS)		3(RR)		4(S)		5(SS)		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X2.1	1	0,02	2	0,04	6	0,12	26	0,52	15	0,30	3,78
X2.2	0	0	4	0,08	6	0,12	30	0,60	10	0,20	3,72
X2.3	0	0	3	0,06	11	0,22	25	0,50	11	0,22	3,82
X2.4	0	0	2	0,04	8	0,16	26	0,52	14	0,28	3,88

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas yaitu :

- a) Pada pernyataan pertama (X2.1) pada pertanyaan pertama (X2.1) yaitu tentang keputusan keputusan pemerintah desa dibuat secara tertulis dan dapat diakses oleh masyarakat, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,78% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,30%, jawaban setuju 0,52%, jawaban ragu-ragu 0,12%, jawaban tidak setuju 0,4%, dan jawaban sangat tidak setuju 0,2%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 26 orang (0,52%).
- b) Pada pernyataan kedua (X2.2) yaitu tentang pembuatan keputusan memperlihatkan nilai-nilai masyarakat dan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder), memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,72% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,20%, jawaban setuju 0,60%, jawaban ragu-ragu 0,12%, dan jawaban

tidak setuju 0,8%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 30 orang (0,60%).

- c) Pada pernyataan ketiga (X2.3) yaitu tentang kebijakan yang diambil oleh aparat desa memiliki sasaran yang jelas dan dapat dipahami masyarakat desa, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,88% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,28%, jawaban setuju 0,52%, jawaban ragu-ragu 0,16%, dan jawaban tidak setuju 0,4%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang (0,50%).
- d) Pada pernyataan keempat (X2.4) yaitu tentang pelaksanaan program pada desa jetis dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,82% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,22%, jawaban setuju 0,50%, jawaban ragu-ragu 0,22%, dan jawaban tidak setuju 0,6%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 26 orang (0,52%).

3) Partisipasi masyarakat

Sebanyak 16 pertanyaan kuesioner disebarkan kepada aparat desa serta masyarakat desa yang memiliki peran dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, responden dipilih berdasarkan keterlibatannya langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Berikut tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden

untuk variabel partisipasi masyarakat (X3) :

Tabel 4.4
Frekuensi variabel partisipasi masyarakat

Item	Skor jawaban										Rata-rata nilai
	1 (STS)		2 (TS)		3(RR)		4(S)		5(SS)		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X3.1	1	0,02	3	0,06	7	0,14	29	0,58	10	0,20	3,9
X3.2	1	0,02	4	0,08	4	0,08	24	0,48	17	0,34	3,48
X3.3	0	0	3	0,06	9	0,18	25	0,50	13	0,26	3,88
X3.4	0	0	1	0,02	9	0,18	25	0,50	15	0,30	3,92

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas :

- a) Pada pernyataan pertama (X3.1) yaitu tentang pernah tidaknya masyarakat desa terlibat secara langsung dalam kegiatan pembangunan yang didanai dari dana ADD, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,9% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,20%, jawaban setuju 0,58%, jawaban ragu-ragu 0,14%, dan jawaban tidak setuju 0,6% dan jawaban sangat tidak setuju 0,2%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 29 orang (0,58%).
- b) Pada pernyataan kedua (X3.2) yaitu tentang pendapat masyarakat diperhitungkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dana desa, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,48% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,34%, jawaban

setuju 0,48%, jawaban ragu-ragu 0,8%, dan jawaban tidak setuju 0,8% dan jawaban sangat tidak setuju 0,2%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 24 orang (0,48%).

- c) Pada pernyataan ketiga (X3.3) yaitu tentang sumbangan dana dari masyarakat desa dikelola secara transparan oleh pemerintah desa, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,92% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,30%, jawaban setuju 0,50%, jawaban ragu-ragu 0,18%, dan jawaban tidak setuju 0,6%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang (0,50%).
- d) Pada pernyataan keempat (X3.4) yaitu tentang pemerintah desa melibatkan warga yang memiliki keahlian tertentu dalam pelaksanaan program dana desa, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,88% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,26%, jawaban setuju 0,50%, jawaban ragu-ragu 0,18%, dan jawaban tidak setuju 0,2%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang (0,50%).

b. Deskripsi Data Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang mempengaruhi atau diubah akibat adanya variabel bebas (Sugiyono, 2020, hal.69). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana desa perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota

(PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi negara kepala desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa.

Sebanyak 16 pertanyaan kuesioner disebarkan kepada aparatur desa dan masyarakat desa yang memiliki peran dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, responden dipilih berdasarkan keterlibatannya langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Berikut adalah tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden unruk variabel Pengelolaan alokasi dana desa (Y)

Tabel 4.5
Frekuensi variabel pengelolaan alokasi dana desa

Item	Skor jawaban										Rata-rata nilai
	1 (STS)		2 (TS)		3(RR)		4(S)		5(SS)		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y.1	0	0	4	0,08	5	0,10	23	0,46	18	0,36	3,74
Y.2	1	0,02	3	0,06	6	0,12	24	0,48	16	0,32	3,9
Y.3	0	0	2	0,04	5	0,10	27	0,54	16	0,32	3,86
Y.4	0	0	2	0,04	5	0,10	25	0,50	18	0,36	3,6
Y.5	0	0	2	0,04	5	0,10	23	0,46	20	0,40	3,94

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas :

- a) Pada pertanyaan pertama (Y.1) yaitu tentang

musyawarah desa dilakukan secara terbuka dalam merumuskan program yang akan didanai, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,74% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,36%, jawaban setuju 0,46%, jawaban ragu-ragu 0,10%, dan jawaban tidak setuju 0,8%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 23 orang (0,46%).

- b) Pada pernyataan kedua (Y.2) yaitu tentang pelaksanaan program yang didanai dana desa dilakukan secara transparan, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,9% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,32%, jawaban setuju 0,48%, jawaban ragu-ragu 0,12%, dan jawaban tidak setuju 0,6% dan jawaban sangat tidak setuju 0,2%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 24 orang (0,48%).
- c) Pada pernyataan ketiga (Y.3) yaitu tentang pencatatan dan dokumentasi keuangan dana desa dilakukan dengan tertib dan sistematis, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,74% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,32%, jawaban setuju 0,54%, jawaban ragu-ragu 0,10%, dan jawaban tidak setuju 0,4%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 27 orang (0,54%).
- d) Pada pernyataan keempat (Y.4) yaitu tentang laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa disusun secara rutin, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,6% yang mana pada pertanyaan pertama

responden memberikan jawaban sangat setuju 0,36%, jawaban setuju 0,50%, jawaban ragu-ragu 0,10%, dan jawaban tidak setuju 0,4%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang (0,50%).

- e) Pada pernyataan kelima (Y.5) yaitu tentang forum atau pertemuan untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa, memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,94% yang mana pada pertanyaan pertama responden memberikan jawaban sangat setuju 0,40%, jawaban setuju 0,46%, jawaban ragu-ragu 0,10%, dan jawaban tidak setuju 0,4%. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 23 orang (0,46%).

2. Analisis Data

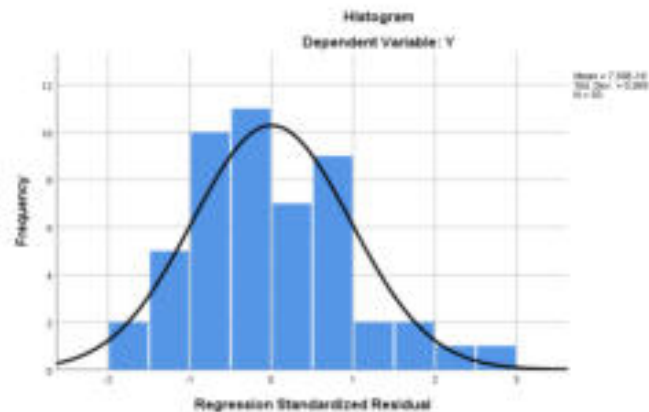
a. Uji Asumsi klasik

Model regresi yang ideal memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas ini dilakukan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik.

1) Uji normalitas

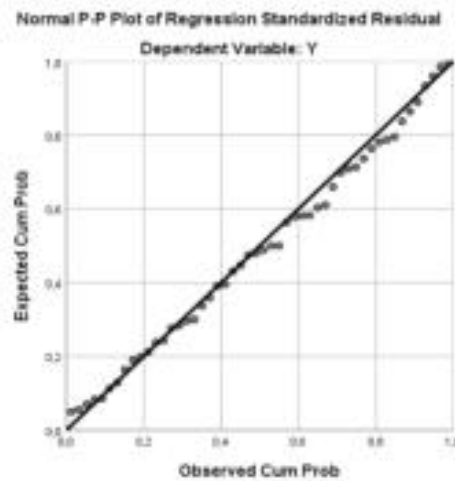
a) Analisis grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan histogram yaitu pucuk kurva tepat berada dititik 0 dan membagi atau mempunyai sisi yang sama tidak menceng ke kanan atau ke kiri menunjukkan pola distribusi normal.



Gambar 4.1
Hasil uji Normalitas Grafik Histogram

Berdasarkan histogram di atas, distribusi data berada di bawah lekungan dan membentuk seperti lonceng. Hal ini berarti bahwa distribusi data adalah normal. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis *normal probability plot*, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.2

11

Hasil Uji Normal Probability Plot

Berdasarkan hasil uji melalui *grafik P-P Plot* di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar lurus di dekat garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini sudah terdistribusi normal. Untuk menguatkan kedua hasil di atas, dilakukan pengujian melalui uji *one sample kolmogorov-smirnov test*. Uji normalitas dilakukan dengan menguji nilai *unstandarized residual* (selisih nilai prediksi dengan nilai sebenarnya) model regresi menggunakan Uji *one sample kolmogorov-smirnov test*. Data dikatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

b) Analisis statistik

Uji normalitas pada suatu data berfungsi agar mempermudah evaluasi data, baik distribusikan secara normal atau tidak, yang nantinya akan digunakan dalam model regresi. Uji *kolmogorov-smirnov* dapat digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Bilamana nilai dari *kolmogorov-smirnov* lebih besar dari ($\alpha = 5\%$), berarti data tersebut dianggap normal.

Tabel di bawah ini menyajikan temuan dari uji normalitas penelitian, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,31085856
Most Extreme Differences	Absolute	0,066
	Positive	0,066
	Negative	-0,044
Test Statistic		0,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di atas yang menunjukkan nilai signifikansinya 0,200 (lebih besar dari 0,05) sehingga data dikatakan terdistribusi normal.

c) **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas dilakukan dengan membandingkan nilai toleransi (*tolerance value*) dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dengan nilai yang disyaratkan. Nilai yang disyaratkan bagi nilai toleransi adalah lebih besar dari 0,01 dan untuk nilai VIF kurang dari 10 (Nasution,2020). Berikut adalah hasil perhitungan uji multikolinieritas :

Tabel 4.7

Hasil Uji Multikolinieritas

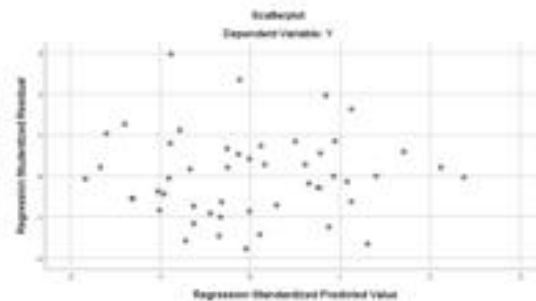
Coefficients ^a		
Model		Collinearity Statistics
		Tolerance VIF
1	(Constant)	
	X1 (Transparansi)	0,946 1,058
	X2 (Akuntabilitas)	0,938 1,066
	X3 (Partisipasi masyarakat)	0,984 1,016

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai toleransi adalah lebih besar dari 0,1 dan untuk nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas pada data penelitian ini.

d) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* dan residual satu pengamatan kepengamatan lain (Ghozali, 2021) cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi linier berganda yaitu dengan melihat *grafik scatterplot*. Suatu penelitian dianggap baik apabila penelitian tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas.



Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik *scatterplot* di atas, diperoleh hasil bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah nilai 0 dan menyebar jauh dari sumbu Y. Selain itu, titik-titik menyebar tanpa membentuk pola tertentu. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada data penelitian.

14
b. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan selanjutnya adalah regresi berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 26 yang dalam perhitungannya diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	1,864	2,798	
	X1 (Transparansi)	0,342	0,151	0,253
	X2 (Akuntabilitas)	0,428	0,135	0,356
	X3 (Partisipasi masyarakat)	0,443	0,116	0,418

11
a. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,864 + 0,342X_1 + 0,428X_2 + 0,443X_3$$

Rumus di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta 1,864 menunjukkan bahwa apabila variabel X1 (Transparansi) , X2 (Akuntabilitas) , dan X3 (Partisipasi masyarakat) bernilai 0, maka variabel Y (Alokasi pengelolaan dana desa) adalah sebesar 1,864.
- 21**
b. Nilai koefisien X1(Transparansi) sebesar 0,342 bernilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap terjadinya peningkatan pada X1 (Transparansi) sebesar 1 kal, dengan asumsi variabel X2 (

Akuntabilitas) dan X3 (Partisipasi masyarakat) konstan, maka Y (Alokasi dana desa) akan meningkat sebesar 0,342.

c. **Nilai koefisien X2 (Akuntabilitas) sebesar 0,428** bernilai positif.

Hal ini dapat diartikan bahwa setiap terjadinya peningkatan pada X2 (akuntabilitas) sebesar 1 kali, dengan asumsi variabel X1 (Transparansi) dan X3 (partisipasi masyarakat) konstan, maka Y (Alokasi dana desa) akan meningkat sebesar 0,428.

d. **Nilai koefisien X3 (partisipasi masyarakat) sebesar 0,443**

bernilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap terjadinya peningkatan pada X3 (partisipasi masyarakat) sebesar 1 kali, dengan asumsi variabel X1 (transparansi) dan X2 (akuntabilitas) konstan, maka Y (alokasi dana desa) akan meningkat sebesar 0,443.

c. **Hasil Uji Hipotesis**

1. **Hasil Uji Parsial (*t-Test*)**

Penggunaan uji t adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS, yang mana pengujian dilakukan dalam signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Adapun kriteria pengambilan keputusan pengujian ini dengan taraf signifikansi 5 % (0,05) dapat disimpulkan jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak, berarti masing masing variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, masing masing variabel bebas secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, berikut disajikan tabel hasil uji parsial :

Tabel 4.9
Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a		
Model	1	Sig.
1 (Constant)	0,666	0,509
X1 (transparansi)	2,262	0,028
X2 (akuntabilitas)	3,174	0,003
X3 (partisipasi masyarakat)	3,816	0,000

a. Dependent Variable: Y

Hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel X1 (transparansi) memiliki nilai Sig. sebesar 0,028.

Karena nilai 0,028 lebih kecil dari 0,05 ($0,028 < 0,05$), ini berarti bahwa X1 (transparansi) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y (alokasi dana desa).

2. Variabel X2 (akuntabilitas) memiliki nilai Sig. sebesar 0,003.

Karena nilai 0,003 lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$), ini berarti bahwa X2 (akuntabilitas) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y (alokasi dana desa).

3. Variabel X3 (partisipasi masyarakat) memiliki nilai Sig. sebesar 0,000. Karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), ini berarti bahwa X3 (partisipasi masyarakat) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y (alokasi dana desa).

c. Uji F (uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk menentukan apakah model regresi layak digunakan dalam menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengambilan keputusan pengujian ini dengan taraf signifikansi 5 % (0,05) dapat disimpulkan jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak, berarti masing masing variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan jika

probabilitas $>0,05$ maka H_0 diterima, masing masing variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, berikut disajikan tabel hasil uji simultan :

Tabel 4.10

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	220,257	3	73,419	12,907	,000 ^b
	Residual	261,663	46	5,688		
	Total	481,920	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan tabel ANOVA di atas, hasil Uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), hal tersebut berarti bahwa variabel X1 (transparansi) , X2 (akuntabilitas) , dan X3 (partisipasi masyarakat) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y (alokasi dana desa).

d. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang baik adalah antara 0 sampai dengan 1. Untuk mengetahui besar presentase variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas, maka dicari nilai *adjusted R square*.

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.676 ^a	0,457	0,422	2,385

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel *Model Summary* di peroleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,422 atau 42,2%. Ini menunjukkan bahwa variabel independen X1(transparansi) , X2 (akuntabilitas), dan X3 (partisipasi masyarakat) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada variabel Y (alokasi dana desa) sebesar 42,2%. Sementara itu, 57,8% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

B. Pembahasan

Pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan hasil uji statistik yang telah dilakukan.

1. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa transparansi (X1) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y) dengan nilai signifikansi $0,028 < 0,05$. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi yang diberikan oleh

pemerintah desa baik terkait proses perencanaan, pelaksanaan, penggunaan anggaran, maupun pelaporan maka, semakin baik kualitas pengelolaan alokasi dana desa. Masyarakat memperoleh informasi secara jelas, akses informasi mudah, serta mekanisme pengaduan dapat dimanfaatkan tanpa hambatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menekan potensi penyalahgunaan anggaran. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Mardiasmo, 2014) bahwa transparansi merupakan prinsip dasar *good governance* yang mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hasil ini juga mendukung penelitian oleh (Angelia et al, 2020) yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas (X2) juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Akuntabilitas mencerminkan sejauh mana aparatur desa mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan, kegiatan, serta pelaksanaan program yang telah direncanakan. Dalam konteks Desa Jetis, pertanggungjawaban tersebut melalui penyusunan laporan secara tertulis, kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana kerja pemerintah desa, serta mekanisme pertanggungjawaban publik yang telah berjalan dengan

baik. Ketika akuntabilitas dilaksanakan dengan baik, muncul kepercayaan bahwa aparat desa bekerja dengan transparan, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan dana desa, maka semakin optimal pula pengelolaan dana tersebut. Hasil ini sejalan dengan teori keagenan dan penelitian oleh (Angelia et al. 2020) serta (Yuli Lestari Labangu et al. 2022).

23

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Partisipasi masyarakat (X3) memberikan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Partisipasi ini mencakup keikutsertaan masyarakat dalam memberikan ide, mengikuti musyawarah desa, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun nonfisik. Temuan ini menguatkan bahwa masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan desa, tetapi juga pelaku dan pengawas jalannya program. Partisipasi masyarakat yang tinggi memberikan efek positif terhadap pengawasan dan akurasi perencanaan, karena program yang direncanakan lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa peran aktif masyarakat dalam musyawarah, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan turut mendukung pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Temuan ini mendukung penelitian

oleh (Angelia et al. 2020) dan (Sofiyah Yatimah Tahir et al. 2020).

4. Pengaruh Simultan X1, X2, dan X3¹⁵ terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Ketiga variabel tersebut secara simultan mampu menjelaskan sebesar 42,2% dari variasi pengelolaan dana desa (*Adjusted R Square* = 0,422). Sisanya, sebesar 57,8%, dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor yang diteliti merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam rangka mewujudkan tata kelola dana desa yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis, Kecamatan Puce, Kabupaten Nganjuk, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Keterbukaan informasi dari pihak pemerintah desa sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa.
2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Pertanggungjawaban yang jelas dari aparat desa membuat masyarakat lebih percaya terhadap pengelolaan dana desa.
3. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat, semakin baik proses pengelolaan dana desa.
4. Ketiga variabel (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat) secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Ketiganya menjelaskan 42,2% variasi dalam pengelolaan dana desa, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara signifikan memengaruhi pengelolaan alokasi dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai landasan untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana desa. Praktiknya, desa dapat menyusun kebijakan dan SOP (*standard operating procedure*) yang mewajibkan pelaporan terbuka dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan hingga pelaporan dan evaluasi. Ini juga

mendorong aparat desa untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan kemampuan komunikasi publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

2. Implikasi teoritis

Penelitian ini memperkuat teori keagenan dan *stewardship* yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan melayani kepentingan masyarakat. Temuan ini mendukung literatur sebelumnya mengenai pentingnya integrasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan publik. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik di bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks tata kelola keuangan desa. Peneliti berikutnya dapat menjadikan temuan ini sebagai dasar untuk menguji variabel lain atau menerapkan pendekatan kuantitatif guna memahami dinamika sosial dan politik dalam pengelolaan dana desa.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Jetis disarankan untuk terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan memberikan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui papan informasi, media sosial, atau forum musyawarah.
2. Bagi aparat desa perlu ditingkatkan kualitas akuntabilitas dalam bentuk pelaporan keuangan yang tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar pengelolaan dana desa lebih profesional
3. Bagi masyarakat Desa Jetis masyarakat diharapkan lebih aktif terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga dapat menciptakan pengawasan partisipatif yang efektif.
4. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini hanya membahas tiga variabel independen. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpengaruh seperti pengawasan internal, kapasitas sumber daya

manusia, atau budaya organisasi dalam rangka memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Pengaruh transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa didesa Jetis kecamatan pace kabupaten Nganjuk

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	ipinternasional.com Internet	1133 words — 8%
2	journal.ikopin.ac.id Internet	241 words — 2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	207 words — 2%
4	repository.umsu.ac.id Internet	199 words — 1%
5	repository.uinsaizu.ac.id Internet	194 words — 1%
6	eprints.pancabudi.ac.id Internet	186 words — 1%
7	prin.or.id Internet	168 words — 1%
8	core.ac.uk Internet	159 words — 1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet	159 words — 1%

10	digilib.iain-jember.ac.id Internet	129 words — 1 %
11	journal.lembagakita.org Internet	124 words — 1 %
12	repository.ub.ac.id Internet	112 words — 1 %
13	simki.unpkediri.ac.id Internet	108 words — 1 %
14	www.scribd.com Internet	96 words — 1 %
15	repository.unja.ac.id Internet	91 words — 1 %
16	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet	90 words — 1 %
17	ejournal2.undip.ac.id Internet	88 words — 1 %
18	openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id Internet	88 words — 1 %
19	dspace.uii.ac.id Internet	85 words — 1 %
20	ejournal.unikama.ac.id Internet	85 words — 1 %
21	repo.darmajaya.ac.id Internet	85 words — 1 %

22	repository.uinjambi.ac.id Internet	84 words — 1%
23	repository.metrouniv.ac.id Internet	80 words — 1%
24	www.kajianpustaka.com Internet	78 words — 1%
25	www.ojs.cahayamandalika.com Internet	75 words — 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE SOURCES < 1%
EXCLUDE MATCHES OFF